

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



Jalan Pemuda No.64 Kav 16-17 Rawamangun Jakarta Timur

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 31 Desember 2021  
Kepala,

drh. Sriyanto, MSi, PhD  
NIP. 197008152001121001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.3. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
    - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
    - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
  - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Desember 2021  
Kepala,

drh. Sriyanto, MSi, PhD  
NIP. 197008152001121001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.334.059.095,00 atau mencapai 131,91% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.285.720.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp20.488.289.183,00 atau mencapai 99,75% dari alokasi anggaran sebesar Rp20.540.183.000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp178.848.836.273,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp329.517.768,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp178.457.031.005,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp62.287.500,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp76.883.541,00 dan Rp178.771.952.732,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.325.215.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp27.097.166.718,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-22.771.951.718,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp695,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-22.771.951.023,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp185.114.555.542,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-22.771.951.023,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-2.400.000,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16.431.748.213,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp178.771.952.732,00.

## **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	3.285.720.000,00	4.334.059.095,00	131,91	1.933.060.564,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>3.285.720.000,00</b>	<b>4.334.059.095,00</b>	<b>131,91</b>	<b>1.933.060.564,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	6.040.946.000,00	6.013.014.644,00	99,54	5.849.634.969,00
Belanja Barang	B.4.	12.849.528.000,00	12.827.428.134,00	99,83	11.556.573.314,00
Belanja Modal	B.5.	1.649.709.000,00	1.647.846.405,00	99,89	5.231.572.823,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>20.540.183.000,00</b>	<b>20.488.289.183,00</b>	<b>99,75</b>	<b>22.637.781.106,00</b>



## II. NERACA

**BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	0,00	8.843.400,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	0,00	-44.217,00
Persediaan	C.1.3.	329.517.768,00	4.199.527.500,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>329.517.768,00</b>	<b>4.208.326.683,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2.1.	113.177.168.000,00	113.177.168.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	93.806.952.430,00	89.934.115.005,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	63.484.299.000,00	63.197.857.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	169.123.000,00	169.123.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-92.180.511.425,00	-85.659.453.937,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>178.457.031.005,00</b>	<b>180.818.809.068,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	475.270.000,00	475.270.000,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	336.500.000,00	811.960.520,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-749.482.500,00	-1.123.203.312,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>62.287.500,00</b>	<b>164.027.208,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>178.848.836.273,00</b>	<b>185.191.162.959,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	76.883.541,00	76.607.417,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>76.883.541,00</b>	<b>76.607.417,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>76.883.541,00</b>	<b>76.607.417,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.6.	178.771.952.732,00	185.114.555.542,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>178.771.952.732,00</b>	<b>185.114.555.542,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>178.848.836.273,00</b>	<b>185.191.162.959,00</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	4.325.215.000,00	1.938.313.400,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>4.325.215.000,00</b>	<b>1.938.313.400,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	6.017.625.514,00	5.839.591.297,00
Beban Persediaan	D.3.	7.045.257.653,00	4.023.549.110,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	6.571.761.005,00	6.040.676.905,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	2.234.508.285,00	2.046.832.727,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	841.576.177,00	1.078.912.563,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	4.386.482.301,00	5.889.183.962,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	-44.217,00	44.217,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>27.097.166.718,00</b>	<b>24.918.790.781,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-22.771.951.718,00</b>	<b>-22.980.477.381,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	999.999,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	695,00	831.769.778,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0,00	291.558.862,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>695,00</b>	<b>541.210.915,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-22.771.951.023,00</b>	<b>-22.439.266.466,00</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	185.114.555.542,00	185.703.492.954,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	-22.771.951.023,00	-22.439.266.466,00
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	-2.400.000,00	32.857.440,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	0,00	7.832.440,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	-2.400.000,00	25.025.000,00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4.	16.431.748.213,00	21.817.471.614,00
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	E.5.	-6.342.602.810,00	-588.937.412,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6.</b>	<b>178.771.952.732,00</b>	<b>185.114.555.542,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/9/ 2006 tanggal 12 September 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP), BBUSKP adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian

BBUSKP mempunyai tugas melaksanakan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati

Fungsi BBUSKP

- a. Penyusunan program, sistem informasi dan dokumentasi pelaksanaan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
- b. Pelaksanaan uji standar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
- c. Pelaksanaan uji rujukan atas hasil uji laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
- d. Pelaksanaan uji konfirmasi hasil pemantauan daerah sebar Hama Penyakit Hewan (HPH)/ Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- e. Pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan uji coba teknik dan metode, pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan HPH/HPHK dan OPT/OPTK;
- g. Penyusunan standarisasi sumberdaya manusia, metode, alat, dan bahan laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
- h. Pelaksanaan validasi/verifikasi metode, alat, dan bahan laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
- i. Pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati
- j. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem

manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati

- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBUSKP.

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian memiliki visi “Menjadi Pusat Standar dan Rujukan Pengujian Laboratorium Kesehatan Pangan Tahun 2019”. Motto BBUSKP adalah “Prioritas Kepuasan Pelanggan Terhadap Hasil Uji Yang Akurat” (*Priority in Customer Satisfaction For Accurate Test Result*).

Dalam rangka mencapai VISI, BBUSKP menetapkan misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Meningkatkan jumlah dan mengembangkan standar pengujian laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
- b. Mengharmonisasikan teknik dan metoda pengujian laboratorium karantina pertanian dan keamanan hayati lingkup regional anggota negara-negara MEA maupun Internasional;
- c. Meningkatkan strategi pemberian bimbingan teknis pengujian, dan penerapan pengawasan serta pengendalian sistem manajemen mutu pelayanan karantina dan laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
- d. Mensinergikan dan penguatan kerjasama dan pengembangan jejaring laboratorium uji tingkat nasional dan internasional;
- e. Meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan uji profesiensisecara nasional dan internasional;
- f. Meningkatkan citra dan kualitas layanan BBUSKP di mata masyarakat khususnya pengguna jasa.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi

aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah sebagai berikut:

### (1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;



harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	3.285.720.000,00	3.285.720.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.285.720.000,00</b>	<b>3.285.720.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.637.507.000,00	5.828.361.000,00
Belanja Lembur	302.800.000,00	212.585.000,00
Belanja Barang Operasional	1.853.072.000,00	2.062.162.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.777.226.000,00	1.601.119.000,00
Belanja Barang Persediaan	2.713.000.000,00	3.176.750.000,00
Belanja Jasa	4.172.886.000,00	2.923.821.000,00
Belanja Pemeliharaan	2.053.671.000,00	2.234.846.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.554.182.000,00	850.830.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	1.363.219.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.400.000.000,00	286.490.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>23.064.344.000,00</b>	<b>20.540.183.000,00</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.334.059.095,00 atau mencapai 131,91% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.285.720.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Pendapatan</b>			
Pendapatan Denda	0,00	343.400,00	0,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	3.285.720.000,00	4.333.715.000,00	131,90
Pendapatan Lain-Lain	0,00	695,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.285.720.000,00</b>	<b>4.334.059.095,00</b>	<b>131,91</b>

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 131,90% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan TA 2021 senilai Rp. 4.333.715.000, berasal dari 2.964 Sertifikat Hasil Pengujian Laboratorium KH, 2.691 Sertifikat Hasil Pengujian Laboratorium Kehati Hewani, 431 Sertifikat Hasil Pengujian Karantina Tumbuhan dan 150 Sertifikat Hasil Pengujian Kehati Nabati. Pendapatan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2020 karena tingginya permohonan pengujian untuk sampel darah babi dan pengujian sarang burung walis.
2. Pendapatan denda sebesar Rp. 343.400,- yang berasal dari pembayaran denda keterlambatan pembayaran billing Tahun 2020 dari PT. Mahkota.
3. Pendapatan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp. 695,- dari pengembalian belanja pembulatan gaji pegawai dari pembayaran kekurangan gaji tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 124,21% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	999.999,00	- 100,00
Pendapatan Denda	343.400,00	0,00	0,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	4.333.715.000,00	1.929.470.000,00	124,61
Pendapatan Lain-Lain	695,00	2.590.565,00	-99,97
<b>Jumlah</b>	<b>4.334.059.095,00</b>	<b>1.933.060.564,00</b>	<b>124,21</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp20.488.289.183,00 atau 99,75% dari anggaran belanja sebesar Rp20.540.183.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

### Rincian Pagu dan Realisasi Belanja

per 31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Pegawai	6.040.946.000,00	6.037.721.930,00	99,95
Belanja Barang	12.849.528.000,00	12.837.269.370,00	99,90
Belanja Modal	1.649.709.000,00	1.647.846.405,00	99,89
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>20.540.183.000,00</b>	<b>20.522.837.705,00</b>	<b>99,92</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>-34.548.522,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>20.540.183.000,00</b>	<b>20.488.289.183,00</b>	<b>99,75</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -9,50% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -9,50% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan disebabkan oleh pengurangan/pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.

Terdapat pengembalian belanja dengan rincian sebagai berikut :

- Pengembalian Kelebihan SPJ Biaya Komunikasi sebesar Rp. 1.000.000
- Pengembalian Kelebihan SPJ Transport dan Uang Harian Perjalanan Dinas senilai Rp. 738.236
- Pengembalian SPJ Biaya Swab/ Antigen Test senilai Rp. 885.000
- Pengembalian SPJ Penginapan Rp. 7.218.000
- Pengembalian Belanja struktural atas transformasi jabatan structural ke fungsional senilai Rp. 24.707.286.

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	6.013.014.644,00	5.849.634.969,00	2,79
Belanja Barang	12.827.428.134,00	11.556.573.314,00	11,00
Belanja Modal	1.647.846.405,00	5.231.572.823,00	-68,50
<b>Total Belanja</b>	<b>20.488.289.183,00</b>	<b>22.637.781.106,00</b>	<b>-9,50</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.013.014.644,00 dan Rp5.849.634.969,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,79% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan belanja pegawai disebabkan oleh adanya transformasi jabatan dari struktural ke jabatan fungsional, kenaikan tunjangan jabatan fungsional, kenaikan pangkat, Gaji berkala, dan penambahan pegawai dari mutasi pindah. Jumlah pegawai BBUSKP per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 76 pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.825.137.930,00	5.599.029.059,00	4,04
Belanja Lembur	212.584.000,00	250.986.000,00	-15,30
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>6.037.721.930,00</b>	<b>5.850.015.059,00</b>	<b>3,21</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-24.707.286,00</b>	<b>-380.090,00</b>	<b>6.400,38</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.013.014.644,00</b>	<b>5.849.634.969,00</b>	<b>2,79</b>

### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.827.428.134,00 dan Rp11.556.573.314,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,00% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan belanja barang mengalami penurunan karena pengurangan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.060.841.497,00	1.792.328.307,00	14,98
Belanja Barang Non Operasional	1.599.347.610,00	1.649.710.969,00	-3,05
Belanja Barang Persediaan	3.175.247.921,00	2.434.475.190,00	30,43
Belanja Jasa	2.917.791.644,00	2.554.313.558,00	14,23
Belanja Pemeliharaan	2.234.508.285,00	2.046.832.727,00	9,17
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	849.532.413,00	1.078.912.563,00	-21,26
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>12.837.269.370,00</b>	<b>11.556.573.314,00</b>	<b>11,08</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>-9.841.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>12.827.428.134,00</b>	<b>11.556.573.314,00</b>	<b>11,00</b>

#### B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.647.846.405,00 dan Rp5.231.572.823,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -68,50% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan belanja modal disebabkan menurunnya pagu belanja modal karena pemotongan untuk penanganan pandemic covid-19.

Perbandingan Belanja Modal  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.361.404.405,00	4.503.043.823,00	-69,77
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.442.000,00	568.869.500,00	-49,65
Belanja Modal Lainnya	0,00	159.659.500,00	-100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.647.846.405,00</b>	<b>5.231.572.823,00</b>	<b>-68,50</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.647.846.405,00</b>	<b>5.231.572.823,00</b>	<b>-68,50</b>



### B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.361.404.405,00 dan Rp4.503.043.823,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -69,77% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Penurunan belanja modal alat lainnya disebabkan pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.361.404.405,00	4.503.043.823,00	-69,77
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.361.404.405,00</b>	<b>4.503.043.823,00</b>	<b>-69,77</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.361.404.405,00</b>	<b>4.503.043.823,00</b>	<b>-69,77</b>

### B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp286.442.000,00 dan Rp568.869.500,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -49,65% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Penurunan terjadi karena adanya pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.442.000,00	568.869.500,00	-49,65
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>286.442.000,00</b>	<b>568.869.500,00</b>	<b>-49,65</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>286.442.000,00</b>	<b>568.869.500,00</b>	<b>-49,65</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.843.400,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak  
per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	8.843.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843.400,00</b>

#### C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp44.217,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

#### C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp329.517.768,00 dan Rp4.199.527.500,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	329.517.768,00	4.199.527.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>329.517.768,00</b>	<b>4.199.527.500,00</b>

Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Persediaan per 1 Januari 2021</b>	<b>4.199.527.500,00</b>
Mutasi Tambah <sup>9</sup>	
Pembelian	3.175.247.921,00
Mutasi Kurang	
Pemakaian	-7.045.257.653,00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>329.517.768,00</b>

Mutasi tambah persediaan terdiri dari transaksi :

1. Transaksi pembelian ATK senilai Rp. 32.134.850 dengan kuitansi No. 73/KWT/PAJ/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021
2. Transaksi pembayaran perjalanan dinas dalam rangka survey dan Bahan Pemeriksaan Laboratorium ke Ciawi dengan SPM No. 55 tanggal 5 Maret 2021
3. Transaksi pengadaan bahan uji laboratorium senilai Rp. 51.956.300 dengan kuitansi No. K-035/PB/VI/2021 Tanggal 2 Juni 2021
4. Transaksi pengadaan bahan uji laboratorium senilai Rp. 65.760.420 dengan SPK No. 433/ PL.110/K.5.A//03/2021 Tanggal 4 Maret 2021.
5. Transaksi pengadaan bahan uji laboratorium senilai Rp. 53.900.000,- dengan SPK No. 701/PL.010/K.5.A/04/2021 Tanggal 14 April 2021
6. Transaksi pengadaan bahan uji laboratorium senilai Rp. 156.000.900 dengan SPK No. 533/PL.110/K.K.5.A/03/2021 Tanggal 19 Maret 2021
7. Terdapat belanja persediaan penanganan Covid-19 berupa masker dan Hand Sanitizer senilai Rp. 39.803.500,- dengan Kuitansi No. 10/KM/KWT/01/2021 Tanggal 28 Januari 2021.
8. Transaksi pengadaan bahan uji laboratorium senilai Rp.1.551.180.950 dengan SPK No. 461/PL.020/K.5.A/03/2021 Tanggal 9 Maret 2021.
9. Terdapat belanja persediaan bahan uji laboratorium sesuai kuitansi No.K-037/PB/VI/2021 Tanggal 23 Juni 2021 senilai Rp. 38.424.650.
10. Terdapat pengadaan bahan uji laboratorium dengan nilai Rp. 171.362.650 dengan SPK No. 1181/PL.1181/PL.010/K.51/06/2021 Tanggal 14 Juni 2021.
11. Terdapat pengadaan bahan persediaan ELISA dengan nilai Rp.38.424.650 sesuai Kuitansi No.K-037/PB/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.
12. Transaksi pengadaan bahan senilai Rp. 171.362.400 sesuai SPK No. 1181/PL.010/K5.A/06/2021 tanggal 14 Juni 2021.
13. Transaksi pengadaan bahan laboratorium senilai Rp. 34.980.000 sesuai dengan kuitansi No.KW.029/MKP/VII/21 tanggal 28 Juni 2021

14. Transaksi pengadaan bahan laboratorium senilai Rp. 1.551.180.950. sesuai dengan SPK No.461/PL.020/K.5.A/03/2021 tanggal 9 Maret 2021
15. Transaksi Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) & Komputer Supplies sesuai Kuitansi No.94/KM/KWT/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021
16. Transaksi pengadaan bahan laboratorium senilai Rp. 73.180.140 sesuai dengan SPK No. 1383/PL.010/K5.A/07/2021 tanggal 12 Juli 2021
17. Transaksi pengadaan bahan laboratorium senilai Rp. 188.918.345 sesuai dengan SPK Nomor: 1742/PL.010/K5.A/08/2021 Tanggal 31 Agustus 2021
18. Transaksi pengadaan bahan laboratorium senilai Rp. 186.242.245 sesuai dengan SPK Nomor: 2196/PL.010/K5.A/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021
19. Transaksi pengadaan bahan laboratorium senilai Rp. Rp.99.969.628 sesuai dengan SPK Nomor: 2257/PL.010/K5.A/11/2021 Tanggal 4 Nopember 2021
20. Transaksi pengadaan bahan laboratorium senilai Rp. 99.732.820 sesuai dengan SPK Nomor: 2258/PL.010/K5.A/11/2021 Tanggal 4 Nopember 2021
21. Transaksi Pengadaan bahan laboratorium senilai Rp. 99.996.270 SPK Nomor: 2259/PL.010/K5.A/11/2021 Tanggal 4 Nopember 2021
22. Transaksi pengadaan bahan laboratorium senilai Rp. 62.297.136 dengan SPK Nomor: 2260/PL.010/K5.A/11/2021 Tanggal 4 Nopember 2021
23. Transaksi pengadaan bahan laboratorium senilai Rp. 30,313,690 dengan Kuitansi No.146/KM/KWT/11/2021 tanggal 9 Nopember 2021

Rincian Pemakaian persediaan antara lain:

- a. BA Opname Fisik No.01/Ba.Opname/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan Nilai Rp.1.142.360.348 ,-
- b. BA Opname Fisik No.02/Ba.Opname/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 dengan Nilai Rp.1.700.981.878 ,-
- c. BA Opname Fisik No.03/Ba.Opname/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan Nilai Rp.221.280.246 ,-
- d. BA Opname Fisik No.04/Ba.Opname/04/2021 tanggal 30 April 2021 dengan Nilai Rp.29.137.021 ,-
- e. BA Opname Fisik No.05/Ba.Opname/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan Nilai Rp.223.586.160 ,-
- f. BA Opname Fisik No.06/Ba.Opname/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 dengan Nilai Rp.42.204.580 ,-
- g. BA Opname Fisik No.07/Ba.Opname/07/2021 tanggal 31 Juli 2021 dengan nilai Rp.45.205.918,-
- h. BA Opnmae Fisik No.08/Ba.Opname/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dengan nilai Rp.37.494.930,-
- i. BA Opname Fisik No.09/Ba.Opname/09/2021 tanggal 30 September 2021 dengan nilai Rp.2.196.385.301,-
- j. BA Opname Fisik No.10/Ba.Opname/10/2021 tanggal 31 Oktober 2021 dengan nilai Rp. 118.316.370
- k. BA Opname Fisik No.11/Ba.Opname/11/2021 tanggal 30 November 2021 dengan nilai Rp. 726.470.404
- l. BA Opname Fisik No.12/Ba.Opname/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan nilai Rp. 557.103.397

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp113.177.168.000,00 dan Rp113.177.168.000,00.

Sesuai dengan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN No. 594/Rev/WKN.07/KNL.02/2019 Tanggal 23 Desember 2019

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	3.830,00m <sup>2</sup>	Jl. Pemuda No. 64 Kav 16-17 Rt., Pulo gadung	113.177.168.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>113.177.168.000,00</b>

Sertifikat kepemilikan tanah No. AH650315 09.05.06.04.4.00501 Tanggal 03 September 1998.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp93.806.952.430,00 dan Rp89.934.115.005,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>89.934.115.005,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	704.731.800,00
Transfer Masuk	2.035.972.500,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	245.567.825,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	475.460.520,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	2.400.000,00
Pengembangan Nilai Aset	411.104.780,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	-2.400.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>93.806.952.430,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-85.326.042.642,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>8.480.909.788,00</b>

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp 3.872.837.425 (Tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah), berasal dari:

1. Transaksi Pembelian berupa A.C Split sebanyak 11 unit sebesar Rp. 84.700.000
2. Transaksi Pembelian berupa Micro Pippettes sebanyak 8 unit sebesar Rp. 69.520.000
3. Transaksi Pembelian berupa Centrifuge sebanyak 1 unit sebesar Rp. 12.760.000
4. Transaksi Pembelian berupa Autoclave sebanyak 1 unit sebesar Rp. 132.000.000
5. Transaksi Pembelian berupa Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate sebanyak 1 unit sebesar Rp. 14.300.000
6. Transaksi Pembelian berupa Waterbath sebanyak 1 unit sebesar Rp. 36.300.000
7. Transaksi Penyelesaian dengan KDP merupakan Pembelian barang Grinder sebanyak 1 unit sebesar Rp. 245.567.825
8. Transaksi Transfer Masuk berupa Sepeda Motor sebanyak 1 unit sebesar Rp. 16.400.000 dari BBKP Tanjung Priok dengan BAST No. 1360/PL.210/K.7.A/02/2021 Tanggal 25 Februari 2021
9. Transaksi Transfer Masuk berupa Refrigerator sebanyak 1 unit sebesar Rp.11.440.000 dari BBKP Surabaya dengan BAST No. 261/PL.210/K.6.A/1/2021 Tanggal 22 Januari 2021
10. Transaksi Transfer Masuk berupa Freezer sebanyak 1 unit sebesar Rp.257.050.000 dari BBKP Surabaya dengan BAST No. 261/PL.210/K.6.A/1/2021 Tanggal 22 Januari 2021
11. Transaksi Transfer Masuk berupa Vortex Mixer sebanyak 1 unit sebesar Rp. 8.580.000 BBKP Surabaya dengan BAST No. 261/PL.210/K.6.A/1/2021 Tanggal 22 Januari 2021
12. Transaksi Transfer Masuk berupa Vortex Mixer sebanyak 1 unit sebesar Rp. 8.580.000 BBKP Surabaya dengan BAST No. 261/PL.210/K.6.A/1/2021 Tanggal 22 Januari 2021
13. Transaksi Transfer Masuk berupa Polimerase Reactor sebanyak 1 unit senilai Rp. 1.244.100.000 dari BKP Kelas I Cilegon dengan BAST No. 1183/PL.310/K.32.A/09/2021 Tanggal 20 September 2021.
14. Transaksi Transfer Masuk berupa Hanphone Encription sebanyak 1 unit senilai Rp. 17.765.000 dari BKP Kelas I Cilegon dengan BAST No. 1183/PL.310/K.32.A/09/2021 Tanggal 20 September 2021.
15. Transaksi Transfer Masuk berupa Bus Penumpang sebanyak 1 unit senilai Rp. 480.637.500 dari BUTTMKP dengan BAST No. 596/TU.360/L.56B/08/2021 Tanggal 26 Agustus 2021.
16. Transaksi pembelian Hidran senilai Rp.197.560.000 sesuai dengan SPK Nomor: 2190/PL.010/K5.A/10/2021 Tanggal 26 Oktober 2021,

17. Transaksi pembelian Freezer senilai Rp.80.000.000 sesuai dengan SPK No. SPK No Nomor: 2241/PL.010/K5.A/11/2021 Tanggal 2 Nopember 2021
18. Transaksi pemeliharaan lift Lab KT berupa penggantian stabilizer seniali Rp.275.000 sesuai dengan kuitansi No.449/KWT-P/PMI/XI/2021 tanggal 16 Nopember 2021
19. Transaksi pengadaan PC untuk alat PCR senilai Rp. 29.920.000 sesuai dengan kuitansi No.069/K/DA/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021
20. Transaksksi pemelihraan computer senilai Rp. 3.500.000 sesuai dengan kuitansi No. No. 070/K/DA/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021
21. Transaksksi pemeliharaan AC senilai Rp. 9.900.000 sesuai dengan Kuitansi No.09/KW/XI/ 2021 tanggal 22 Nopember 2021 dan

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp63.484.299.000,00 dan Rp63.197.857.000,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>63.197.857.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pengembangan Nilai Aset	205.585.000,00
Pengembangan Melalui KDP	80.857.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>63.484.299.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-6.826.892.130,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>56.657.406.870,00</b>
Nilai Buku per 31 Desember 2021	56.657.406.870,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Transaksi pemeliharaan geddng dan bangunan gardu listrik senilai Rp. 37.544.000 sesuai dengan Kuitansi No. 12/KW/JC/XI/2021 Tanggal 8 November 2021
2. Transaksi pengadaan penambahan atap gedung laboratorium KH senilai Rp. 168.041.000 sesuai SPK No. 2189/PL.010/K5.A/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021.
3. Transaksi pengadaan pemeliharaan gedung Kantor Lab KT senilai Rp. 65.998.000 sesuai SPK No. 2187/PL.010/K5.A/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021
4. Transaksi pengadaan pemeliharaan gedung arsip senilai Rp. 14.859.000 sesuai kuitansi No.21/KW/AAP/XII/2021 Tanggal 16 Desember 2021.

#### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp169.123.000,00 dan Rp169.123.000,00. Lokasi jalan, irigasi dan jaringan berada di Jalan Pemuda No.64 Kav 16-17 Rawamangun

#### C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-92.180.511.425,00 dan Rp-85.659.453.937,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	93.806.952.430,00	-85.326.042.642,00	8.480.909.788,00
2.	Gedung dan Bangunan	63.484.299.000,00	-6.826.892.130,00	56.657.406.870,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	169.123.000,00	-27.576.653,00	141.546.347,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>157.460.374.430,00</b>	<b>-92.180.511.425,00</b>	<b>65.279.863.005,00</b>

#### C.4. ASET LAINNYA

##### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp475.270.000,00 dan Rp475.270.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud yang dimiliki berupa software aplikasi SIMLAB, SILAQU dan Q-LIS

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	475.270.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>475.270.000,00</b>



#### C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp336.500.000,00 dan Rp811.960.520,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>811.960.520,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-475.460.520,00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>336.500.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-336.500.000,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>0,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Terdapat reklasifikasi dari aset lainnya ke Aset Tetap senilai Rp. 475.460.520, merupakan Aset Tetap yang digunakan kembali dari aset yang telah dihentikan operasionalnya.

#### C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-749.482.500,00 dan Rp-1.123.203.312,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

##### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	475.270.000,00	-412.982.500,00	62.287.500,00
2.	Aset Lain-lain	336.500.000,00	-336.500.000,00	0,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>811.770.000,00</b>	<b>-749.482.500,00</b>	<b>62.287.500,00</b>

## C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

### C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp76.883.541,00 dan Rp76.607.417,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	4.610.870,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	72.272.671,00	76.607.417,00
<b>Jumlah</b>	<b>76.883.541,00</b>	<b>76.607.417,00</b>

Rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut :

1. Belanja Barang yang masih harus dibayar adalah tagihan listrik bulan desember senilai Rp. 72.272.671
2. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar adalah rapel kekurangan gaji atas kenaikan pangkat dan kenaikan fungsional pegawai dari bulan Oktober – Desember senilai Rp. 4.610.870,-

## C.6. EKUITAS

### C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp178.771.952.732,00 dan Rp185.114.555.542,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.325.215.000,00 dan Rp1.938.313.400,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Lainnya	0,00	343.400,00	-100,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	4.325.215.000,00	1.937.970.000,00	123,18
<b>Jumlah</b>	<b>4.325.215.000,00</b>	<b>1.938.313.400,00</b>	<b>123,14</b>

Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan TA 2021 senilai Rp. 4.333.715.000, berasal dari 2.964 Sertifikat Hasil Pengujian Laboratorium KH, 2.691 Sertifikat Hasil Pengujian Laboratorium Kehati Hewani, 431 Sertifikat Hasil Pengujian Karantina Tumbuhan dan 150 Sertifikat Hasil Pengujian Kehati Nabati. Pendapatan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2020 karena tingginya permohonan pengujian untuk sampel darah babi dan pengujian sarang burung walis

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.017.625.514,00 dan Rp5.839.591.297,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.819.944.450,00	3.770.327.450,00	1,32
Beban Pembulatan Gaji PNS	57.719,00	53.642,00	7,60
Beban Tunj. Anak PNS	79.931.662,00	79.927.044,00	0,01
Beban Tunj. Beras PNS	211.321.560,00	183.150.180,00	15,38

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Fungsional PNS	714.157.000,00	527.030.000,00	35,51
Beban Tunj. PPh PNS	34.635.213,00	24.723.351,00	40,09
Beban Tunj. Struktural PNS	51.178.980,00	118.705.000,00	-56,89
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	255.975.930,00	248.764.630,00	2,90
Beban Tunjangan Umum PNS	39.890.000,00	40.120.000,00	-0,57
Beban Uang Lembur	212.584.000,00	250.986.000,00	-15,30
Beban Uang Makan PNS	597.949.000,00	595.804.000,00	0,36
<b>Jumlah</b>	<b>6.017.625.514,00</b>	<b>5.839.591.297,00</b>	<b>3,05</b>

Kenaikan beban pegawai disebabkan adanya kenaikan pangkat, transformasi jabatan structural ke fungsional, kenaikan tunjangan fungsional dan kenaikan Gaji Berkala pegawai.

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.045.257.653,00 dan Rp4.023.549.110,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	7.045.257.653,00	4.023.549.110,00	75,10
<b>Jumlah</b>	<b>7.045.257.653,00</b>	<b>4.023.549.110,00</b>	<b>75,10</b>

Beban persediaan mengalami kenaikan disbanding tahun 2020 karena tingginya permohonan pengujian laboratorium terutama untuk pengujian serum darah babi, daging babi dan pengujian sarang burung walle.

### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.571.761.005,00 dan Rp6.040.676.905,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1.561.657.610,00	1.649.710.969,00	-5,34
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	188.568.200,00	102.660.750,00	83,68
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	188.630.000,00	243.740.000,00	-22,61
Beban Honor Output Kegiatan	37.690.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	48.564.658,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	1.605.967.925,00	1.296.377.024,00	23,88
Beban Jasa Profesi	66.350.000,00	244.300.000,00	-72,84
Beban Keperluan Perkantoran	1.395.079.773,00	1.167.434.557,00	19,50
Beban Langganan Air	33.243.520,00	70.584.620,00	-52,90
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	269.315.981,00	51.507.000,00	422,87
Beban Langganan Listrik	826.951.003,00	863.826.753,00	-4,27
Beban Langganan Telepon	3.240.811,00	33.642.232,00	-90,37
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	260.798.135,00	260.832.000,00	-0,01
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	26.765.389,00	17.661.000,00	51,55
Beban Sewa	58.938.000,00	38.400.000,00	53,48
<b>Jumlah</b>	<b>6.571.761.005,00</b>	<b>6.040.676.905,00</b>	<b>8,79</b>

Beberapa beban barang dan jasa yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi antara lain:

1. Kenaikan pada beban barang operasional-penanganan pandemic covid adalah pembelian desinfektan, vitamin, masker dan hand sanitizer
2. Kenaikan pada beban langganan daya dan jasa lainnya adalah kenaikan langganan jasa internet dan jasa langganan zoom
3. Kenaikan pada beban jasa penanganan pandemic covid adalah pembayaran pemeriksaan swab dan antigen test.

Untuk belanja penanganan Covid -19 terdapat anggaran senilai Rp. 144.244.200 dengan rincian sebagai berikut :

1. Transaksi senilai Rp. 6.967.912 adalah pembayaran untuk pelaksanaan rapid test Covid-19 dan Swabtest pegawai
2. Transaksi senilai Rp. 15.675.000 untuk pembelian vitamin dan desinfektan dengan SPM No. 29 Tanggal 3 Februari 2021

3. Transaksi Biaya komunikasi dengan No.SPM 138 tanggal 7 Mei 2021 dengan nilai Rp. 61.800.000,-
4. Transaksi biaya komunikasi dengan No.SPM 180 tanggal 16 Juni 2021 dengan nilai Rp. 30.600.000,-
5. Transaksi untuk pembelian vitamin dan desinfektan dengan SPM. No 114 tanggal 23 April 2021 dengan nilai 15.537.500
6. Transaksi pembelian masker dan hand sanitizer dengan SPM No. 10 tanggal 3 Februari 2021 dengan nilai Rp. 39.803.500,-
7. Transaksi senilai Rp. 10.719.928 adalah pembayaran untuk pelaksanaan rapid test Covid-19 dan Swabtest pegawai
8. Transaksi biaya komunikasi bulan Mei dan Juni untuk 76 pegawai. senilai Rp. 20.511.700

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.234.508.285,00 dan Rp2.046.832.727,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	706.617.817,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	670.616.780,00	-100,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	341.623.000,00	148.018.300,00	130,80
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.186.267.468,00	1.228.197.647,00	-3,41
<b>Jumlah</b>	<b>2.234.508.285,00</b>	<b>2.046.832.727,00</b>	<b>9,17</b>

Beban pemeliharaan mengalami kenaikan karena adanya kenaikan pagu pada belanja pemeliharaan karena adanya penambahan peralatan mesin dan gedung yang baru.

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp841.576.177,00 dan Rp1.078.912.563,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	647.691.834,00	385.141.203,00	68,17
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	57.750.000,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.050.000,00	33.450.000,00	-34,08
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.814.000,00	18.328.000,00	-2,80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	154.020.343,00	584.243.360,00	-73,64
<b>Jumlah</b>	<b>841.576.177,00</b>	<b>1.078.912.563,00</b>	<b>-22,00</b>

#### D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.386.482.301,00 dan Rp5.889.183.962,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	101.739.708,00	136.107.167,00	-25,25
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.456.824.760,00	1.477.061.203,00	-1,37
Beban Penyusutan Jaringan	4.394.919,00	4.394.919,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.823.522.914,00	4.271.620.673,00	-33,90
<b>Jumlah</b>	<b>4.386.482.301,00</b>	<b>5.889.183.962,00</b>	<b>-25,52</b>

#### D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-291.558.862,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	829.179.213,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	999.999,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	695,00	2.590.565,00	-99,97
<b>Jumlah</b>	<b>695,00</b>	<b>541.210.915,00</b>	<b>-100,00</b>



## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp185.114.555.542,00 dan Rp185.703.492.954,00.

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-22.771.951.023,00 dan Rp-22.439.266.466,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-2.400.000,00 dan Rp32.857.440,00.

#### E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.832.440,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

#### E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-2.400.000,00 dan Rp25.025.000,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-2.400.000,00
Peralatan dan Mesin	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-2.400.000,00</b>

#### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16.431.748.213,00 dan Rp21.817.471.614,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	20.488.289.183,00
Diterima dari Entitas Lain	-4.334.059.095,00
Transfer Masuk	277.518.125,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.431.748.213,00</b>

##### E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-4.334.059.095,00 sedangkan DKEL sebesar Rp20.488.289.183,00.

##### E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp277.518.125,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018120100412126000KD	16.400.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018120100412126000KD	-16.400.000,00
3.	Peralatan dan Mesin	018120200499436000KD	480.637.500,00
4.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018120200499436000KD	-480.637.500,00
5.	Peralatan dan Mesin	018120500237483000KD	277.070.000,00
6.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018120500237483000KD	-17.316.875,00
7.	Peralatan dan Mesin	018122900499480000KD	1.261.865.000,00

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
8.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018122900499480000KD	-1.244.100.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>277.518.125,00</b>

#### E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 178.771.952.732,00 dan Rp 185.114.555.542,00.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

-

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah :

Bank BNI Cabang Rawamangun No.Rek 0012957783 a.n. Bendahara Pengeluaran Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian

Bank Mandiri KCP Rawamangun Balai Pustaka No.Rek 006-00-0688876-6 a.n. Bendahara Penerimaan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, namun sejak bulan September 2015, rekening tersebut telah di tutup dikarenakan bahwa setiap satker yang menyetor jasa pengujian bisa dilakukan dengan kode billing dan tidak lagi disetor melalui rekening bendahara penerima.

2. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, DIPA yang ada di Satker Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian telah direvisi sebanyak 8 kali.
3. Terdapat pengembalian pendapatan senilai Rp. 2.800.000 atas billing Nurhidayah Ragil